



# **P**EMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA **DINAS KESEHATAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh Kode Pos 26229

Telepon (0752) 92418 Fax. (0752) 92172

Email : [dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id](mailto:dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id)

---

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Payakumbuh, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**dr. Hj. Tien Septino, M.Kes**  
**NIP. 19630910 199101 2 001**

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN

TAHUN 2019

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Kesehatan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

### 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kesehatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

### **1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

### **1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
10. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
  
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Pendapatan
  - 5.2 Belanja
  - 5.3 Neraca
  - 5.4 Laporan Operasional
  - 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas
  
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
  
- VII. Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan.

Tujuan dari pembangunan kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan menjangkau pelayanan bermutu, secara adil dan merata.

Adapun strategi utama Dinas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Membangun paradigma sehat berbasis kerakyatan
2. Memberikan hak-hak kesehatan secara berdaulat ke masyarakat dengan fokus pelaksanaan kegiatan berada pada Puskesmas dan Poskesri.
3. Pelaksanaan kegiatan diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program secara bertahap.
4. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat Nagari sebagai pelaku utama.
5. Penyelenggaraan kegiatan lebih mengutamakan proses perubahan perilaku dari pada target angka.
6. Adanya kesepakatan tentang pilihan kegiatan oleh masyarakat nagari bersama unsur kesehatan dan unsur terkait lainnya secara terintegrasi.
7. Bersinergi dengan berbagai unsur dalam merancang dan melaksanakan kegiatan.

**2.2 Kebijakan Keuangan**

**2.2.1 Pendapatan.**

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
- tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

### **2.2.2. BELANJA**

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kasda.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain .
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### **2.2.3.ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 39.810.594	Rp. 3.322.000	16,61
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 382.120.000	Rp. 248.963.384	65,15
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp. 15.000.000	Rp. 12.076.800	80,51
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 401.740.000	Rp. 328.950.000	81,58
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 80.000.000	Rp. 78.914.000	98,64
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 204.706.000	Rp. 93.897.110	45,86
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 247.836.181	Rp. 34.857.806	14,06
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.500.000	Rp. 6.377.900	98,12
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.040.000	Rp. 3.385.000	67,16
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 154.155.000	Rp. 21.977.500	14,25
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 334.343.000	Rp. 292.256.003	87,41
12.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 149.500.000	Rp. 145.678.900	97,44
13.	Pengadaan Meubelair	Rp. 77.440.000	Rp. 76.220.000	98,42
14.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp. 226.925.000	Rp. 225.270.800	99,27
15.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 219.585.400	Rp. 199.047.317	90,04
16.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000	Rp. 5.340.000	21,36
17.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 45.000.000	Rp. 43.000.000	95,55
18.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 328.373.000	Rp. 310.236.000	94,48
19.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.676.000	Rp. 38.769.000	95,31
20.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Rp. 105.791.000	Rp. 73.897.000	69,85

21.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 45.429.000	Rp. 32.038.000	70,52
22.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 41.807.000	Rp. 23.584.000	56,41
23.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 2.939.981.000	Rp. 2.853.302.387	97,05
24.	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 35.225.000	Rp. 34.344.000	97,49
25.	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 25.495.000	Rp. 23.125.000	98,54
26.	Distribusi Obat dan E-Logistik	Rp. 123.174.000	Rp. 121.625.000	98,74
27.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 301.338.000	Rp. 276.095.300	91,62
28.	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 1.649.535.000	Rp. 1.285.517.604	77,93
29.	Penyusunan Akreditasi Puskesmas	Rp. 2.138.703.000	Rp. 1.480.754.552	69,24
30.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Koto Baru Simalanggang	Rp. 954.610.000	Rp. 666.626.225	69,83
31.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Batu Hampar	Rp. 671.765.000	Rp. 588.101.247	87,54
32.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Piladang	Rp. 530.340.000	Rp. 368.584.588	69,49
33.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Mungo	Rp. 883.900.000	Rp. 709.075.276	80,22
34.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Halaban	Rp. 565.700.000	Rp. 426.035.281	75,31
35.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Pakan Rabaa	Rp. 848.545.000	Rp. 708.769.521	83,53
36.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Situjuh	Rp. 848.545.000	Rp. 702.299.826	82,76
37.	Penyediaan Dukungan Operasional Kesehatan Pusk. Taram	Rp. 707.120.000	Rp. 594.219.588	84,03



38.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Tanjung Pati	Dukungan Operasional	Rp. 954.610.000	Rp. 775.280.411	81,21
39.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Danggung2	Dukungan Operasional	Rp. 919.255.000	Rp. 725.034.516	78,87
40.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Padang Kandis	Dukungan Operasional	Rp. 494.985.000	Rp. 373.281.475	75,38
41.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Mungka	Dukungan Operasional	Rp. 848.545.000	Rp. 491.464.775	57,92
42.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Suliki	Dukungan Operasional	Rp. 777.830.000	Rp. 660.322.183	84,89
43.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Maek	Dukungan Operasional	Rp. 530.340.000	Rp. 431.607.925	81,,38
44.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Br. Gunung	Dukungan Operasional	Rp. 530.340.000	Rp. 467.478.175	88,15
45.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Bj. Loweh	Dukungan Operasional	Rp. 459.625.000	Rp. 386.345.214	84,05
46.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Kt. Tinggi	Dukungan Operasional	Rp. 636.405.000	Rp. 392.294.563	61,64
47.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. M. Paiti	Dukungan Operasional	Rp. 742.75.000	Rp. 470.227.348	63,33
48.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Pangkalan	Dukungan Operasional	Rp. 777.830.000	Rp. 774.900.657	99,62
49.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Rb. Data	Dukungan Operasional	Rp. 424.270.000	Rp. 345.838.975	81,51
50.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. G. Malintang	Dukungan Operasional	Rp. 424.270.000	Rp. 406.205.075	95,74
51.	Penyediaan Bantuan Kesehatan Pusk. Sialang	Dukungan Operasional	Rp. 565.695.000	Rp. 522.502.600	92,36
52.	Manajemen BOK		Rp. 900.000.000	Rp. 430.716.900	47,85
53.	BOK Kesehatan		Rp. 1.206.000.000	Rp. 440.089.400	36,49
54.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Rp. 110.000.000	Rp. 90.560.685	82,32

55.	Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional	Rp. 30.000.000	Rp. 29.710.000	99,03
56.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza	Rp. 45.980.000	Rp. 40.853.400	88,85
57.	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Rp. 71.600.000	Rp. 28.190.000	39,37
58.	Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Rp. 25.075.000	Rp. 23.205.000	92,54
59.	Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Rp. 28.400.000	Rp. 13.142.000	46,27
60.	Upaya Kesehatan Rujukan	Rp. 11.972.500	Rp. 11.932.500	95,15
61.	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Rp. 47.510.000	Rp. 42.532.000	89,50
62.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahaya Berbahaya	Rp. 39.990.000	Rp. 28.287.500	70,73
63.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 204.350.000	Rp. 150.256.200	73,53
64.	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Rp. 20.055.000	Rp. 9.360.000	46,67
65.	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Rp. 75.000.000	Rp. 72.955.000	97,27
66.	Pengembangan Nagari Siaga	Rp. 70.000.000	Rp. 35.465.000	50,66
67.	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Rp. 45.516.000	Rp. 38.664.000	84,94
68.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Rp. 40.000.000	Rp. 30.420.318	76,05
69.	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY	Rp. 10.065.000	Rp. 10.065.000	100,00
70.	Peningkatan Gizi Lebih	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	100,00
71.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 24.267.000	Rp. 24.227.000	99,83
72.	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 202.160.000	Rp. 171.325.032	84,74
73.	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Rp. 35.000.000	Rp. 31.553.000	90,15
74.	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Rp. 34.674.000	Rp. 27.784.300	80,13
75.	Monev	Rp. 25.000.000	Rp. 23.623.400	94,49

76.	Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk	Rp. 50.510.000	Rp. 46.706.014	92,47
77.	Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	Rp. 130.220.000	Rp. 105.926.500	81,34
78.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 92.000.000	Rp. 82.005.000	89,13
79.	Peningkatan Imunisasi	Rp. 48.376.000	Rp. 47.956.300	99,13
80.	Peningkatan Surveillance, Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Rp. 122.195.000	Rp. 111.840.000	91,52
81.	Komisi Penanggulanga AIDS	Rp. 11.975.000	Rp. 98.231.600	87,13
82.	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 25.000.000	Rp. 13.909.000	55,63
83.	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pely. Kes	Rp. 46.268.000	Rp. 18.329.400	39,61
84.	Pengembangan SIK	Rp. 569.300.000	Rp. 435.690.000	76,53
85.	Pembangunan/Peningkatan Puskesmas	Rp. 7.064.979.000	Rp. 274.375.100	3,80
86.	Pengadaan Puskel			
87.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 2.054.217.124	Rp. 1.336.119.259	65,04
88.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Rp. 362.185.000	Rp. 357.032.100	98,57
89.	Monev	Rp. 34.270.000	Rp. 29.735.000	86,77
90.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 182.050.000	Rp. 163.681.440	89,91
91.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	Rp. 200.000.000	Rp. 197.236.947	98,61
92.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu	Rp. 1.055.220.041	Rp. 478.655.693	45,36
93.	Kemitraan Asuransi Kesmas	Rp. 6.829.151.000	Rp. 4.796.916.600	70,24
94.	Monev	Rp. 60.860.000	Rp. 45.156.847	74,19
95.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp. 51.702.000	Rp. 51.577.000	99,76

96.	Pelayanan Kesehatan	Rp. 68.300.000	Rp. 68.295.000	99,99
97.	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil produksi RT	Rp. 45.000.000	Rp. 42.986.000	95,52
98.	Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi	Rp. 125.000.000	Rp. 121.814.000	97,45
99.	Jaminan Persalinan	Rp. 2.594.000.000	Rp. 2.212.918.917	85,30
100.	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Rp. 20.966.186.467	Rp. 15.253.585.850	72,75

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KENERJA KEUANGAN**

**3.1.1 Pendapatan.**

Pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 terdiri dari:

a. Lain-lain PAD yang Sah

- Jasa Layanan Umum Rp. 820.532.000,-

Jasa Layanan Umum pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat pada Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola oleh Holding BLUD Dinas Kesehatan.

- Non Kapitasi Rp. 932.012.795,-

Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan terdiri dari Jasa Persalinan, Jasa ANC/PNC, KB, Ambulance, Rawat Inap dan Prolanis.

- Kapitasi Rp. 14.081.550.960,-

Kapitasi merupakan pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Jenis Pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>18.248.513.814</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>86,77</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>18.248.513.814</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>86,77</b>

**3.1.2 Belanja.**

**Pelaksanaan Realisasi Belanja**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD. Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2019**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>BELANJA</b>			
<b>Belanja Operasi</b>	<b>113.478.852.049</b>	<b>99.274.289.536</b>	<b>87,48</b>
- Belanja Pegawai	56.684.668.894	56.331.083.354	95,99
- Belanja Barang	54.794.183.155	42.943.206.182	78,37
- Belanja Hibah	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>113.478.852.049</b>	<b>99.274.289.536</b>	<b>87,48</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>16.715.482.152</b>	<b>7.430.164.297</b>	<b>44,45</b>
- Belanja Tanah	0	0	0
- Belanja Peralatan dan Mesin	3.203.058.124	2.341.344.838	73,10
- Belanja Gedung dan Bangunan	8.035.249.041	967.741.593	12,04
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
- Belanja Aset Tetap Lainnya	5.477.174.987	4.121.077.866	75,24
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>16.715.482.152</b>	<b>7.430.164.297</b>	<b>44,45</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>130.194.334.201</b>	<b>106.704.453.833</b>	<b>81,96</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(111.945.820.387)</b>	<b>(90.870.358.078)</b>	<b>81,17</b>

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 106.704.453.833,-. Jumlah tersebut mencapai 81,96 % dari total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 130.194.334.201,-. Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 113.478.852.049,- terealisasi sebesar Rp. 99.274.289.536,- atau sebesar 87,48%, yang terdiri dari belanja pegawai APBD sebesar 56.056.559.354,- dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 227.4524.000 atau sebesar 95,99% dan belanja barang yang dianggarkan sebesar Rp. 54.794.183.155,- terealisasi sebesar 42.943.206.182,- terdiri dari belanja barang APBD sebesar Rp. 32.085.222.198,- dan belanja barang BLUD sebesar Rp. 10.857.983.984,- atau sebesar 78,37%. Pada Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 16.715.482.152,- terealisasi sebesar Rp. 7.430.164.297,- terdiri dari Belanja Modal APBD sebesar Rp. 3.309.086.431,- dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp. 4.121.077.866,- atau sebesar 44,45%.

Adapun rincian Belanja Modal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 3.203.058.124,- terealisasi sebesar Rp. 2.341.344.838,- atau sebesar 73,10 %, terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin	38.500.000	38.500.000
2.	Belanja Modal Pengadaan Gordena (Vertical Blind)	27.500.000	27.432.000
3.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	519.790.000	513.570.400
4.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	554.210.000	422.502.000
5.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000	28.570.500
6.	Belanja Modal Pengadaan Notebook/Laptop	53.420.000	51.585.500
7.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Printer/Plotter	12.000.000	11.791.400
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.824.963.124	1.246.193.038
9.	Belanja Modal Pengadaan Kedokteran Gigi	142.675.000	1.200.000

- b. Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 8.035.249.041,- terealisasi sebesar Rp. 967.741.591,- atau sebesar 12,04% terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	226.925.000	225.270.800
2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.808.324.041	742.470.793

- c. Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 5.477.174.987,- terealisasi sebesar Rp. 4.121.077.866,- atau sebesar 75,24% terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal BLUD Puskesmas	5.477.174.987	4.121.077.866

Terdapat defisit dari anggaran pendapatan dan belanja sebesar (90.870.358.078,-) atau sebesar 81,17% dari jumlah anggaran sebesar (111.945.820.387,-).

### 3.13 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% diantaranya sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 39.810.594	Rp. 3.322.000	16,61

- a. Anggaran pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 16,61% disebabkan karena anggaran pada belanja paket/pengiriman tidak terealisasi yang mengakibatkan rendahnya capaian realisasi keuangan pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 382.120.000	Rp. 248.963.384	65,15

- b. Realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 65,15% disebabkan karena terdapat anggaran yang double yaitu pada belanja listrik pada anggaran BLUD dan anggaran APBD

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 204.706.000	Rp. 93.897.110	45,86

- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasi sebesar 45,86% disebabkan karena tender gagal yang waktu tendernya dimulai bulan maret sementara hasil tender keluar dibulan juni 2019.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 247.836.181	Rp. 34.857.806	14,06

- d. Hasil lelang keluar bulan juli dan kontrak dimulai dari awal september 2019 sehingga realisasi yang bisa dicairkan hanya 14,06%.



No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.040.000	Rp. 3.385.000	67,16

- e. Yang tidak terealisasi adalah peraturan perundang-undangan dimana penyedia tidak tersedia di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun di Payakumbuh.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 154.155.000	Rp. 21.977.500	14,25

- f. Anggaran pada Penyediaan Makanan dan Minuman terlalu besar di 2019 yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat di RKA tahun 2019.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000	Rp. 5.340.000	21,36

- g. Pada pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor tidak terlaksana karena pemeliharaan pada service LCD, Laptop, Genset dan Mobiler tidak ada.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Rp. 105.791.000	Rp. 73.897.000	69,85

- h. Kegiatan di atas tidak terlaksana karena output kegiatan sudah tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yang tidak memakai anggaran yang sudah tersedia seperti kontribusi, akomodasi dan transportasi.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 45.429.000	Rp. 32.038.000	70,52

- i. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD karena tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 41.807.000	Rp. 23.584.000	56,41

- j. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD karena tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Akreditasi Puskesmas	Rp. 2.138.703,000	Rp. 1.480.754.522	69,24

- h. Kegiatan sudah terlaksana 100% tapi pagu dana dari Kementerian Kesehatan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pagu SAB yang ada pada kabupaten.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Koto Baru Simalanggang	Rp. 954.610.000	Rp. 666.626.225	69,83
3.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Piladang	Rp. 530.340.000	Rp. 368.584.588	69,49
4.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Mungka	Rp. 848.545.000	Rp. 491.464.775	57,92
5.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Koto Tinggi	Rp. 636.405.000	Rp. 392.294.563	61,64
6.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. M. Paiti	Rp. 742.475.000	Rp. 470.217.348	63,33
7.	Manajemen BOK	Rp. 900.000.000	Rp. 430.716.900	47,85
8.	BOK Kesehatan	Rp. 1.206.000.000	Rp. 440.089.400	36,49

- i. BOK Pada Puskesmas

Penyebab tidak terlaksananya kegiatan ini karena pada tahun 2019 Puskesmas dalam masa akreditasi sehingga Puskesmas lebih fokus kepada pelayanan dan penilaian akreditasi. Kurangnya tenaga pada Puskesmas jg berpengaruh pada pembuatan dan pertanggung jawaban SPJ.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Rp. 71.600.000	Rp. 28.190.000	39,37

j. Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kegiatan ini tidak terlaksana 100% karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu dalam penanggulangan bencana seperti biaya makan, sedangkan biaya lainnya sudah ditanggung oleh BPBD.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Rp. 28.400.000	Rp. 13.142.000	46,27

k. Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer

Tidak terlaksananya kegiatan upaya kesehatan tradisional dan komplementer disebabkan karena terdapat double kegiatan dengan dana DBHCHT yang mana kegiatannya sudah terlaksana.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Rp. 39.990.000	Rp. 28.287.500	70,73

l. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Realisasi keuangan pada kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya tidak terlaksana disebabkan karena tidak adanya pendampingan dari Balai Besar POM.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Rp. 204.350.000	Rp. 150.256.200	73,53

m. Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar sehat

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya anggaran berada pada DPA Perubahan pada bulan Desember 2019 .

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Rp. 20.055.000	Rp. 9.360.000	46,67

n. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena belanja Germas di Masyarakat tidak terlaksana karena sudah diaanggarkan juga di dana Propinsi sehingga tidak bisa mencairkan anggaran pada APBD.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengembangan Nagari Siaga	Rp. 70.000.000	Rp. 35.465.000	50,65

o. Pengembangan Nagari Siaga

Kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya salah penganggaran yakni seharusnya perjalanan dinas luar daerah teranggarkan di perjalanan dalam daerah.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 25.000.000	Rp. 13.909.000	55,63

p. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Penyebab tidak terlaksananya kegiatan ini karena belanja sosialisasi yang bisa dicairkan karena sudah terlaksana di kegiatan Provinsi.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan dan Pemutakhiran data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 46.268.000	Rp. 18.329.400	39,61

q. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini tidak terlaksana karena anggarannya terdapat pada DPA Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan/Peningkatan Puskesmas	Rp. 7.064.979.000	Rp. 274.375.100	3,80

r. Pembangunan / Peningkatan Puskesmas

Pembangunan / Peningkatan Puskesmas tidak terlaksana karena adanya gagal lelang pada kegiatan pekerjaan relokasi Puskesmas Baruah Gunung yang dananya cukup besar pada kegiatan ini.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 2.054.217.124	Rp. 1.336.119.259	65,04

s. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Kegiatan ini tidak terlaksana karena Puskesmas yang tidak mencairkan dana yang sudah dianggarkan untuk Puskesmas disebabkan karena anggarannya juga sudah terdapat pada dana BLUD Puskesmas.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu	Rp. 1.055.220.041	Rp. 478.655.693	45,36

t. Rehabilitasi Sedang / Berat Pustu

Kegiatan ini tidak terlaksana karena Puskesmas yang tidak mencairkan dana yang sudah dianggarkan untuk Puskesmas disebabkan karena anggarannya juga sudah terdapat pada dana BLUD Puskesmas.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.829.151.000	Rp. 4.796.916.600	70,24

u. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Realisasi kemitraan asuransi kesehatan masyarakat hanya 70,24% disebabkan karena adanya penambahan pada kegiatan JKSS di Bulan Desember 2019 sehingga tidak terlaksana.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjaawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

#### **4.2 Kebijakan Kapitalisir**

- (1) Pengeluaran anggaran untuk belanja barang akan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal apabila:
  - a. Barang yang dibeli memberi manfaat lebih dari satu tahun.
  - b. Pembelian barang tersebut tidak bersifat rutin.
  - c. Harga Barang tersebut sama atau lebih dari Rp. 500.000,- per satuan barang

- (2) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya *tidak rutin dan memberikan manfaat lebih satu periode akuntansi* akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing belanja pemeliharaan sebagai berikut:

<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>Jumlah</b>
Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Jembatan	Rp 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor	Rp 10.000.000

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

1. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya peroleh termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

3. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

10. Asset Tetap Lainnya

Asset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Asset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Asset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap baru.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi asset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

Pendapatn-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang , dan menjadi hak pemerintah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :



1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

#### **4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, criteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

#### **4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di PPKD dan SKPD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

#### **4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerinta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti tertulis di atas.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

<b>5.1</b>	<b>Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>		
<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2018</b>
		<b>( Rp. )</b>	<b>( Rp. )</b>
<b>5.1.1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>13.686.826.961</b>
<b>a.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>0</b>	<b>1.447.218.000</b>
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	640.566.000
	- Setoran Klaim Jampersal		
	- Setoran BPJS	0	806.652.000
<b>b.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Syah</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>12.239.608.961</b>

Jumlah realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp. 15.834.095.755,- merupakan lain-lain pendapatan yang syah atas Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lain-lain Pendapatan yang Syah terdiri dari :

- Jasa Layanan Umum	Rp. 820.532.000,-
- Non Kapitasi	Rp. 932.012.975,-
- Kapitasi	<u>Rp. 14.081.550.960,-</u>
Jumlah	Rp. 15.834.095.755,-

Pada Tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp. 13.686.826.961,- terdiri atas: retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 640.566.000,-. Setoran BPJS Tahun 2018 Rp. 806.652.000,-. Dan Pendapatan dari JKN sebesar Rp. 12.239.095.755,-,

<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2018</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>56.331.083.354</b>	<b>48.416.174.385</b>

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2019.

Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri atas :

Gaji dan Tunjangan	46.297.040.512	40.823.006.725
Tambahan Penghasilan Pegawai	9.866.940.842	7.157.229.160
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	25.312.500
Uang Lembur	167.102.000	132.569.000
Honorarium PNS	274.524.000	278.057.000
Honorarium Non PNS		
Sub. Jumlah	56.331.083.354	48.416.174.385

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>42.943.206.182</b>	<b>32.647.962.345</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan 2018, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 mencapai 78,37% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Belanja Bahan Habis Pakai	1.318.418.252	1.266.462.097
- Belanja Bahan / Material	3.399.963.381	1.793.153.061
- Belanja Jasa Kantor	4.166.565.915	3.856.562.518
- Belanja Premi Asuransi	6.726.811.600	3.121.677.717
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	269.539.864	185.922.282
- Belanja Cetak dan Penggandaan	660.025.011	549.759.500
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	62.100.000	76.650.000
- Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.960.000	9.950.000
- Belanja Makan dan Minum	835.825.650	846.012.600
- Biaya Pakaian Dinas	43.000.000	0
- Biaya Pakaian Kerja	9.240.000	19.773.000
- Belanja Perjalanan Dinas	6.388.779.292	5.434.210.467
- Belanja Pemeliharaan	173.474.440	149.565.000
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi	6.846.914.793	4.027.027.926
- Honorarium PNS	693.180.000	563.130.000
- Honorarium Non PNS	198.900.000	1.009.000.000
- Belanja Hibah	0	224.840.000
- Belanja Barang/Jasa BLUD	11.132.507.984	9.739.106.177
<b>Sub Jumlah</b>	<b>42.943.206.182</b>	<b>32.647.962.345</b>

<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal.</b>	<b>7.430.164.297</b>	<b>12.445.710.327</b>
------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.430.164.297,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.715.482.152,- atau sebesar 44,45% dari dana yang dianggarkan, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 12.445.710.327,- Realisasi tersebut rendah disebabkan karena pengadaan pembangunan Puskesmas Baruah Gunung gagal lelang dimana tidak ada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

**5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.341.344.838 5.104.365.951**

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2019 dan 2018. Untuk Tahun 2019 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 73,10% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 3.203.058.124,-.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor	0	0
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat pengolah Air Kotor	0	1.043.646.560
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	65.932.000	520.393.623
4.	Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Khusus	0	819.025.000
5.	Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	0	69.135.000
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin	0	21.911.313
7.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	0	2.500.000
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	513.570.400	229.709.625
9.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	514.449.400	633.420.000
10.	Belanja Modal Alat Studio	0	67.559.999
11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.247.393.038	2.217.419/453
	Total	2.341.344.838	5.104.365.951

**5.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 967.741.593 3.091.534.622**

Merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018. Untuk Tahun 2019 realisasi belanja Modal sebesar Rp. 967.741.593,- mencapai 12,04% dari Jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.035.249.041,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	225.270.800	201.155.000
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	742.470.793	2.890.379.622
Total		967.741.593	3.824.220.100

**5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan** **0** **30.597.585**

Merupakan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan Tahun 2019 dan 2018. Untuk Tahun 2019 realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 0,- sedangkan pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 218.236.950,-

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

a.	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih	138.869.850,-
b.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	7.486.000,-
c.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	<u>71.881.100,-</u> +
<b>Jumlah</b>		<b>218.236.950,-</b>

**5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** **4.121.077.866** **4.031.572.804**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 4.121.077.866,- merupakan Realisasi Belanja Modal BLUD yang terdiri dari :

a.	Peralatan Mesin	Rp. 4.079.802.266,-
b.	Tidak Dikapitalisir	Rp. 15.075.600,-
c.	Mutasi ke Sekda (Teralis)	Rp. 6.700.000,-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Merupakan Realisasi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp. 3.895.182.804 dan Belanja Modal Jasa Kontruksi dari dana APBD sebesar Rp. 136.390.000,-.

Belanja Modal BLUD sebesar Rp. 3.895.182.804 terdiri dari :

d.	Peralatan Mesin	Rp. 3.128.729.404,-
e.	Gedung dan Bangunan	Rp. 715.248.400,-
f.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	<u>Rp. 51.205.000,-</u>
		Rp. 3.895.182.804,-

Sedangkan Belanja Modal Jasa Kontruksi dari dana APBD sebesar Rp. 136.390.000,- merupakan DED relokasi Puskesmas Baruah Gunung.

## 5.2 Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Neraca Dinas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 memiliki Total Asset sebesar Rp. 82.755.672.565,47,-. Total Kewajiban sebesar Rp. 827.559.309,- dan Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 81.928.113.256,47,-.

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.1	<b>Aset Lancar</b>	<b>8.740.389.358,15</b>	<b>7.800.492.041,53</b>
5.2.1.1	Kas di Bendahara Penerima	0	2.996.500,00

Penerimaan Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, dana Non Kapitasi dan Kapitasi JKN yang dikelola oleh Holding BLUD Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2019 tidak terdapat kas di bendahara penerima.

Pada Tahun 2018 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang terdiri dari :

No.	Puskesmas	Jumlah	Tanggal Setor
1	Puskesmas Situjuh	Rp. 257.500,-	14 Januari 2019
2	Puskesmas Pakan Rabaa	Rp. 82.500,-	14 Januari 2019
3	Puskesmas Taram	Rp. 105.000,-	14 Januari 2019
4	Puskesmas Batu Hampar	Rp. 192.500,-	14 Januari 2019
5	Puskesmas Mungka	Rp. 120.000,-	14 Januari 2019
6	Puskesmas Koto Baru	Rp. 269.000,-	14 Januari 2019
7	Puskesmas Sialang	Rp. 105.000,-	14 Januari 2019
8	Puskesmas Maek	Rp. 30.000,-	14 Januari 2019
9	Puskesmas G. Malintang	Rp. 75.000,-	14 Januari 2019
10	Puskesmas Mungo	Rp. 150.000,-	14 Januari 2019
11	Puskesmas Pangkalan	Rp. 37.500,-	14 Januari 2019
12	Puskesmas Koto Tinggi	Rp. 140.000,-	14 Januari 2019
13	Puskesmas Suliki	Rp. 659.000,-	07 Januari 2019
14	Puskesmas M. Paiti	Rp. 773.500,-	07 Januari 2019

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.1.2	Kas di Bendh. Pengeluaran	0,-	66.296.827,-

Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat kas di bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

Per 31 Desember 2018 kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 66.296.8827,- yang merupakan UYHD Tahun 2018 dan telah disetorkan ke Kas Daerah Tanggal 08 Januari 2019 (STS Terlampir).

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.1.3	Kas di BLUD	3.244.253.704	2.663.743.799

Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang terdiri dari 22 Puskesmas yaitu :

No.	Puskesmas	Jumlah
1.	Koto Tinggi	175.565.488
2.	Suliki	57.062.173
3.	Baruah Gunung	23.666.791
4.	Banja Loweh	22.084.093
5.	Maek	66.019.050
6.	Padang Kandis	19.213.920
7.	Dangung-dangung	235.186.857
8.	Mungka	135.057.574
9.	Koto Baru Simalanggang	682.483.711
10.	Batu Hampar	292.509.605
11.	Piladang	10.506.880
12.	Mungo	185.499.268
13.	Pakan Rabaa	425.741.541
14.	Situjuh	154.221.790
15.	Halaban	86.853.011
16.	Taram	86.329.579
17.	Tanjung Pati	374.529.338
18.	Pangkalan	104.189.299
19.	Rimbo Data	13.787.870
20.	Gunung Malintang	22.347.318

No.	Puskesmas	Jumlah
21.	Muaro Paiti	29.194.188
22.	Sialang	41.430.099
23.	Holding	774.260
Total		3.244.253.704

Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari 22 Puskesmas yaitu :

No.	Puskesmas	Jumlah
1.	Koto Tinggi	88.693.467
2.	Suliki	1.087.979
3.	Baruah Gunung	4.670.240
4.	Banja Loweh	92.524.126
5.	Maek	186.458.798
6.	Padang Kandis	13.519.706
7.	Dangung-dangung	181.538.326
8.	Mungka	96.670.942
9.	Koto Baru Simalanggang	351.063.802
10.	Batu Hampar	266.977.665
11.	Piladang	4.216.127
12.	Mungo	336.074.833
13.	Pakan Rabaa	348.862.353
14.	Situjuh	159.323
15.	Halaban	163.077.186
16.	Taram	54.786.745
17.	Tanjung Pati	236.275.711
18.	Pangkalan	638.601
19.	Rimbo Data	670.140
20.	Gunung Malintang	25.152.865
21.	Muaro Paiti	121.784.843
22.	Sialang	51.011.907
23.	Holding	37.821.113
24.	Pajak RTGS Bulan Mei dan November	7.000
Total		2.663.743.799



No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.1.3.02	Piutang Retribusi	0	261.700.000

Tidak terdapat piutang retribusi pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 yang terdiri dari :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Klaim Non Persalinan Tahun 2017 sebesar | Rp. 700.000,-     |
| 2. Klaim Non Persalinan Tahun 2018 sebesar | Rp. 261.000.000,- |

Piutang Retribusi pada tahun 2018 tersebut sudah dibayarkan oleh BPJS pada Tahun 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Tanggal 11 Februari 2019 | 129.442.000,- |
| 2. Tanggal 8 Maret 2019     | 68.872.000,-  |
| 3. Tanggal 29 Maret 2019    | 91.683.000,-  |
| 4. Tanggal 05 April 2019    | 69.023.000,-  |
| 5. Tanggal 16 April 2019    | 8.495.000,-   |
| 6. Tanggal 06 Mei 2019      | 17.350.000,-  |

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Syah	43.130.000	0

Terdapat piutang lain-lain PAD yang Syah pada tahun 2019 sebesar Rp. 43.130.000,- dimana piutang tersebut merupakan piutang non kapitasi pada holding BLUD Puskesmas yang terdiri dari :

No	Puskesmas	Bulan Pelayanan	Jumlah
1.	Banja Loweh	November	Rp. 2.100.000
2.	Taram	September	Rp. 6.300.000
3.	Taram	Oktober	Rp. 7.700.000
4.	Pakan Rabaa	November	Rp. 5.600.000
5.	Mungka	November	Rp. 1.460.000
6.	Koto Tinggi	November	Rp. 2.800.000
7.	Halaban	November	Rp. 945.000
8.	Gunung Malintang	September	Rp. 2.450.000
9.	Gunung Malintang	Oktober	Rp. 6.075.000
10.	Batu Hampar	November	Rp. 7.700.000
Total			Rp. 43.130.000

Pada tahun 2018 tidak terdapat Piutang Lain-lain PAD yang Syah karena pendapatan di tahun 2018 masih terdapat pada pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Retribusi	0	(1.308.500)

Tidak terdapat penyisihan piutang retribusi pada tahun 2019. Sedangkan Penyisihan Piutang Retribusi pada Tahun 2018 sebesar Rp. (1.308.500) merupakan piutang retribusi yang terdiri dari Tahun 2017 sebesar Rp. 700.000,- sehingga penyisihannya sebesar Rp. 3.500 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 261.000.000 sehingga penyisihannya sebesar Rp. 1.305.000,-

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Syah	(215.650)	0

Terdapat penyisihan piutang lain-lain PAD yang syah pada tahun 2019 sebesar (Rp. 215.650) yang merupakan penyisihan piutang dari dana non kapitasi holding BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 43.130.000,-

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.1.5	Persediaan	5.427.908.054,15	4.807.063.415,53

Terdapat persediaan akhir Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan dan Intalasi Farmasi Kabupaten serta Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp. 5.427.908.054,15,- dengan perincian sebagai berikut :

-	Obat-obatan (APBD)	Rp. 4.010.275.988,95
a.	Persediaan yang berasal dari dana APBD	
-	Persediaan ATK	Rp. 134.261.259,00
-	Alat Listrik	Rp. 1.600.000,00
-	Alat Kebersihan	Rp. 608.300,00
-	Alat Kedokteran	Rp. 15.085.260,00
-	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	<u>Rp. 576.056.344,20</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.737.887.152,15</b>
b.	Persediaan yang berasal dari dana BLUD	
-	Obat-obatan	Rp. 45.631.670,00
-	Bahan Dokter Habis Pakai	Rp. 459.471.030,00
-	Persediaan ATK	Rp. 165.464.420,00
-	Alat Kebersihan	Rp. 18.488.782,00
-	Alat Listrik	<u>Rp. 965.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 690.020.902,00</b>

Terdapat persediaan akhir Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan dan Intalasi Farmasi Kabupaten serta Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp. 4.807.063.415,53 dengan perincian sebagai berikut :

- Obat-obatan	Rp. 3.915.235.978,99
c. Persediaan yang berasal dari dana APBD	
- Persediaan ATK	Rp. 47.279.637,00
- Alat Listrik	Rp. 2.256.000,00
- Alat Kebersihan	Rp. 2.336.300,00
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	<u>Rp. 698.272.515,95</u>
Jumlah	Rp. 750.144.452,95
d. Persediaan yang berasal dari dana BLUD	
- Persediaan ATK	Rp. 132.946.156,25
- Alat Kebersihan	<u>Rp. 8.736.827,34</u>
Jumlah	Rp. 141.682.983,59

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>5.2.2</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>71.018.319.725,14</b>	<b>72.110.817.398,42</b>
5.2.2.1	T a n a h	2.278.928.350	2.278.928.350

Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.278.928.350,-

*(dapat dilihat pada Lampiran I.A)*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.2.2	Peralatan dan Mesin	58.096.606.562,67	52.969.202.371,87

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 58.096.606.562,67 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 52.969.202.371,87 sehingga terdapat penambahan aset pada peralatan mesin sebesar Rp. 5.127.404.190,80. Penambahan tersebut terdiri dari :

**a. Mutasi Tambah :**

- Belanja Modal Peralatan Mesin 2019	Rp. 2.341.344.838,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	Rp. 4.079.802.266,-
- Hibah dari Kemenkes dan Dinas LH	Rp. 94.415.310,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.515.562.414,-</b>

Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp. 2.341.344.838,- terdiri dari :

- Alat Kantor Rumah Tangga	Rp. 1.093.951.800,-
- Alat Kedokteran	Rp. 1.218.613.038,-
- Alat Laboratorium	Rp. 28.780.000,-

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 4.079.802.266,- merupakan belanja Modal BLUD yang terdiri dari belanja alat Kantor Rumah tangga sebesar Rp. 2.441.257.408,- alat kedokteran sebesar Rp. 1.341.810.358,- dan alat labor sebesar Rp. 40.676.000,- sehingga mempengaruhi penambahan pada peralatan mesin.

Hibah dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp. 90.548.268,- terdiri dari alat kedokteran berupa alat antropometri kit sebanyak 22 set yang sudah dihibahkan dengan BAST Nomor KN. 01.01/2/PPK-ANTROP/00487/2019

Hibah dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman berupa Tong Sampah pada Puskesmas Tanjung Pati sebesar Rp. 1.929.995,- yang sudah dihibahkan dengan BAST Nomor : 17/BA/PSLP/DLHPP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dan Puskesmas Situjuh sebesar Rp. 1.937.047,- dengan BAST Nomor : 17/BA/PSLP/DLHPP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019.

**b. Mutasi Keluar**

Ekstrakom 2017, 2018, 2019	Rp. 1.362.106.839
BM yang tidak dikapitalisir	<u>Rp. 26.051.385</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.388.158.224</b>

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 52.060.736.838,87 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 43.839.257.386,87 sehingga terdapat penambahan aset pada peralatan mesin sebesar Rp. 8.221.479.452,87. Penambahan tersebut terdiri dari :

**c. Mutasi Tambah :**

- Belanja Modal Peralatan Mesin 2018	Rp. 5.104.365.951,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	Rp. 3.128.729.404,-
- Mutasi Masuk dari DP2KBP3A	Rp. 187.640.000,-
- Hibah dari Kemenkes	Rp. 87.718.395,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.508.453.750,-</b>

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.128.729.404,- merupakan

belanja Modal BLUD yang terdiri dari belanja alat kedokteran pada Puskesmas sebesar Rp. 1.725.329.448, alat kedokteran sebesar Rp. 1.160.544.956,- dan alat studio sebesar Rp. 24.855.000,- sehingga mempengaruhi penambahan pada peralatan mesin.

Mutasi masuk dari DP2KBP2A sebesar 187.640.000- terdiri dari alat kedokteran berupa Lemari Alat Kontrasepsi yang sudah dihibahkan pada Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BAST Nomor 674/297/DPPKB.P3A-LK/VII/2018 Bulan Juli 2018.

Hibah dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp.87.718.395,- terdiri dari alat kantor rumah tangga sebesar Rp. 23.230.455 dan HP CDMA sebesar Rp. 484.000 yang sudah dihibahkan dengan BAST Nomor KN. 02.07/X/618/2018 Tanggal 21 Februari 2018 dan Alat kedokteran sebesar Rp. 64.003.940,- dengan BAST Nomor : KN.02.04/6/PPK/1091/VI/2018 Tanggal 8 Agustus 2018

**d. Mutasi Keluar**

Ekstrakom 2018	Rp. 215.320.433
BM yang tidak dikapitalisir	<u>Rp. 71.653.865</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 286.974.298</b>

( Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.B )

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.2.3	Gedung dan Bangunan	71.670.995.340	70.447.407.172

Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp. 71.670.995.340,- sedangkann pada tahun 2018 sebesar Rp. 70.447.407.172,-. Terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 1.223.588.168,- yang terdiri dari :

a. Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2019	Rp. 967.741.593,-
- Mutasi Tambah dari Dinas Kominfo	Rp. 44.541.000,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	Rp. 19.500.000,-
- Reklas Masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 355.060.569,-
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	Rp. 116.793.806,-

Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp. **967.670.995.340,-** terdiri

dari :

1. Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	Rp. 742.470.793,-
2. Rehab Kantor Dinas Kesehatan	<u>Rp. 225.270.800,-</u>
Jumlah	Rp 967.670.340,-

Mutasi Tambah dari Kominfo sebesar Rp. 44.541.000,- merupakan Pemeliharaan Gedung Ex. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pencatatannya masih berada di Dinas Kesehatan karena belum ada serah terima ke Dinas Komunikasi dan Informasi sampai akhir tahun 2019.

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 19.500.000,- merupakan belanja dari BLUD yang terdiri dari Perencanaan DED Puskesmas Maek sebesar Rp. 5.400.000,- Pengawasan Pekerjaan Puskesmas Maek sebesar Rp. 7.600.000,- Perencanaan DED Puskesmas Mungka sebesar Rp. 2.700.000,- Pengawasan Pekerjaan Puskesmas Mungka sebesar Rp. 3.800.000,-

Reklas Masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 355.060.569,- merupakan Renovasi Puskesmas Pangkalan pada Pengadaan Tahun 2018.

Kapitalisasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp. **116.793.806,-** terdiri dari :

1. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Mungka	Rp. 94.800.000,-
2. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Maek	Rp. 21.993.806,-

b. Mutasi Keluar

- Reklas Keluar ke Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 39.175.000,-
- Penghapusan	Rp. 15.603.000,-
- Mutasi keluar OPD ke Setda	Rp. 225.270.800,-

Reklas keluar ke Kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 35.050.000,- merupakan DED Poskesri Pua Data Kec. Gunung Omeh dimana pada tahun 2020 tidak terdapat anggaran untuk pembangunan Poskesri Pua Data tersebut dan sebesar Rp. 4.125.000 yang merupakan Honor Pokja Relokasi Puskesmas Baruah Gunung.

Penghapusan sebesar Rp. 15.603.000,- merupakan penghapusan dari Rumah Dinas Dokter Puskesmas Muaro Paiti sesuai SK Nomor : 329 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019.

Mutasi keluar OPD sebesar Rp. 225.270.800,- terdiri dari Rehab kantor eks Bupati

Lima Puluh Kota ke Sekretariat Daerah.

Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebesar Rp. 70.447.407.172,-. Terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 3.191.212.953,- yang terdiri dari :

a. Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2018	Rp. 3.091.534.622,-
- Mutasi Tambah dari Dinas Kominfo	Rp. 31.476.000,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	Rp. 715.248.400,-
- Reklas Masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 310.386.500,-
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	Rp. 146.542.000,-

Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. **3.091.534.622,-** terdiri dari :

1. Pengadaan Bangunan Kesehatan	Rp 3.088.059.622,-
2. Relokasi Puskesmas Baruah Gunung berupa Honor Tim Asistensi dan PPHP DED	Rp. 3.475.000,-

Mutasi Tambah dari Kominfo sebesar Rp. 31.476.000,- merupakan Pemeliharaan Gedung Ex. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pencatatannya masih berada di Dinas Kesehatan karena belum ada serah terima ke Dinas Komunikasi dan Informasi sampai akhir tahun 2018.

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 715.248.400,- merupakan belanja dari BLUD yang terdiri dari Rehab Puskesmas dan pembuatan terali pada holding BLUD yang berada pada Dinas Kesehatan.

Reklas Masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 310.386.500,- merupakan Pembangunan Poskesri Panang yang belum selesai pada Pengadaan Tahun 2018.

Kapitalisasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp. **146.542.000,-** terdiri dari :

a. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pangkalan	Rp. 47.135.000,-
b. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Mungka	Rp. 24.600.000,-
c. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Dangung-dangung	Rp. 74.807.000,-

3. Mutasi Keluar

- Reklas keluar ke Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 358.535.569,-
- Penghapusan	Rp. 13.561.000,-
- Mutasi keluar OPD	Rp. 731.878.000,-

Reklas keluar ke Kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 358.535.569,- merupakan

renovasi Puskesmas Pangkalan sebesar Rp. 355.060.569,- dan Honor tim asistensi dan PPHP DED Relokasi Puskesmas Baruah Gunung.

Mutasi keluar OPD sebesar Rp. 731.878.000,- terdiri dari Gedung eks Puskesmas Suliki sebesar Rp. 527.093.000 yang telah dihibahkan sesuai dengan berita acara serah terima barang nomor : 900/218/Diskes.1/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan Rehab kantor eks Bupati Lima Puluh Kota ke Sekretariat Daerah sebesar Rp. 201.155.000,- Terali sebesar Rp. 3.630.000,

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	597.367.845,-	597.367.845,-

Tidak terdapat penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2019 yaitu tetap sebesar Rp. 597.367.845,-.

Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2018 mengalami penambahan sebesar Rp. 269.441.950,- dari tahun 2017 sebesar 327.925.895 yang terdiri dari :

**a. Mutasi Tambah**

- Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jaringan Rp. 218.236.950,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya Rp. 51.205.000,-

Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. **218.236.950,-** terdiri dari :

1. Pengadaan Instalasi Air Puskesmas Rp. 146.355.850,-
2. Pengadaan Jaringan Listrik Rp. 71.881.100,-

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 51.205.000,- merupakan belanja BLUD terdiri dari Penambahan Daya Listrik dan Rehab Jaringan Listrik Puskesmas Tanjung Pati.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	29.810.100,-	29.810.100,-

Pada tahun 2019 terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan belanja Modal BLUD sebesar Rp. 4.121.077.866,- yang direklas keluar ke Peralatan Mesin sebesar Rp. 4.099.302.266, tidak dikapitalisir sebesar Rp. 15.075.600,- dan reklas keluar ke Sekda berupa teralis Dinas Kesehatan sebesar Rp. 6.700.000. Sehingga pada tahun 2019 tidak terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya karena sudah direklas keluar ke masing-masing KIB nya.

*Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.E*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
-----	-----------	------------	------------



5.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 179.040.000 494.925.569,-,-

Pada Tahun 2019 Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 179.040.000 yang terdiri dari :

DED Poskesri Pua Data Kec. Gunung Omeh sebesar Rp. 35.050.000,- dimana pada tahun 2020 tidak terdapat anggaran untuk pembangunan Poskesri Pua Data tersebut dan sebesar Rp. 4.125.000 yang merupakan Honor Pokja Relokasi Puskesmas Baruah Gunung.

Terdapat reklas keluar ke Gedung Bangunan sebesar Rp. 355.060.569,- yang merupakan Renovasi Puskesmas Pangkalan pada Tahun 2018 yang telah final di tahun 2019.

Pada Tahun 2018 Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 494.925.569 yang terdidri dari :

1. Renovasi Puskesmas Pangkalan sebesar Rp. 355.060.569,-
2. Honor Tim Asistensi dan PPHP DED Relokasi Puskesmas Baruah Gunung Rp. 3.475.000,-
3. Relokasi Puskesmas Baruah Gunung Rp. 136.390.000,-

Terdapat reklas keluar ke Gedung Bangunan sebesar Rp. 310.386.500 yang merupakan Pembangunann Poskesri Panang pada Tahun 2017 yang telah final di tahun 2018.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(61.834.428.472,53)	(53.798.358.476,45)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.292.535.851,11)	(34.586.143.029,00)

Pada Tahun 2019 terdapat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (41.292.535.851,11). Terdapat penambahan dari tahun 2018 disebabkan adanya pengadaan peralatan mesin yang bersumber dari dana BLUD.

Pada Tahun 2018 terdapat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (34.586.143.029,00).

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
-----	-----------	------------	------------

1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung (20.468.054.631,68) (19.154.904.517,46) dan Bangunan

Pada Tahun 2019 terdapat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 20.468.054.631,68). Nilai tersebut mendapat penambahan dari nilai tahun 2018 disebabkan adanya pembangunan gedung dan bangunan pada tahun sebelumnya yang sudah dijadikan aset pada tahun 2019 dan nilai rehab gedung dan bangunan tahun 2019. Penyusutan juga termasuk dari dana BLUD dimana gedung induk bangunan terdapat pada Dinas Kesehatan, sementara itu belanja BLUD hanya belanja rehab gedung dan bangunan.

Pada Tahun 2018 terdapat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar , Rp. (19.154.904.517,46).

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(73.837.989,74)	(57.310.929,99)

Pada tahun 2019 terdapat akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp. 73.837.989,74). Nilai tersebut bertambah dari tahun 2018 dikarenakan masa manfaat berjalan pada Jaringan Irigasi dan Jalan bertambah.

Pada Tahun 2018 terdapat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. (57.310.929,99). Nilai tersebut merupakan penyusutan yang terdiri dari penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kab. Lima Puluh Kota.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>5.2.3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.996.963.482,18</b>	<b>2.996.963.482,18</b>
5.2.3.1	Asset Lainnya (Peralatan Mesin yang rusak berat )	1.228.352.032,00	506.419.532,00

Pada tahun 2019 terdapat aset lainnya yaitu peralatan mesin yang rusak berat sebesar Rp. 1.228.352.032,00. Nilai peralatan mesin yang rusak berat dapat ditunjukkan dengan bentuk fisiknya yang sudah tidak bisa terpakai / rusak berat.

Pada tahun 2018 terdapat pengurangan Asset Lainnya (Peralatan Mesin yang rusak berat) sebesar Rp. 506.419.532,-

*Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.F*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.3.2	Asset Tak Berwujud	286.911.000	286.911.000

Pada tahun 2019 tidak aset tak berwujud sebesar Rp. 286.911.000 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018.

*Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.G*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	Asset Dalam Penelusuran	1.481.700.450,18	2.203.632.950,18

Pada tahun 2019 aset dalam penelusuran sebesar Rp. 1.481.700.450,18 mengalami penurunan dari tahun 2018 disebabkan karena aset dalam penelusuran tersebut sudah diketahui fisiknya dalam keadaan rusak berat, sehingga dapat dipindahkan ke aset lain-lain yang rusak berat.

Aset Dalam Penelusuran Tahun 2018 sebesar Rp. 2.203.632.950,18.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>5.2.4</b>	<b>K E W A J I B A N</b>	<b>827.559.309,-</b>	<b>418.753.556,-</b>
5.2.4.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,-	0,-

Pada tahun 2019 utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 0,-

*Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.A.*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.4.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	827.559.309,-	418.753.556,-

Pada tahun 2019 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 827.559.309,- yang terdiri dari :

a.	Utang TV Kabel	Rp. 570.000,-
b.	Utang Persalinan	<u>Rp. 826.989.309,-</u>
	Jumlah	Rp. 827.559.309,-

Pada tahun 2018 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 418.753.556 yang terdiri dari :

a.	Utang Listrik	Rp, 2.181.150,-
b.	Utang Air	Rp. 871.240,-
c.	Utang Speedy	Rp. 1.746.766,-
d.	Utang TV Kabel	Rp. 660.000,-
e.	Utang Persalinan	<u>Rp. 413.294.400,-</u>
	Jumlah	Rp. 418.753.556,-

*Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2.B*

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.4.3	Dana Titipan Pihak Ketiga	-	-

Pada tahun 2019 dan 2018 Dana Titipan Pihak Ketiga Nihil.

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.2.5	Ekuitas	81.928.113.256,47	82.489.519.366,13

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Asset dengan Jumlah Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 81.928.113.256,47 sedang pada Tahun 2018 sebesar 82.489.519.366,13.

*Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2.C.*

### 5.3 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2019. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0.-	1.446.404.000,-

Tidak terdapat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2019 disebabkan karena pendapatan tersebut pada tahun 2019 sudah dikelola oleh Holding BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Tahun 2018 Pendapatan Retribusi Daerah tersebut terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 640.566.000,-, Klaim Non Kapitasi sebesar Rp. 787.466.000,- .

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.877.225.755,-	12.239.608.961

Pada Tahun 2019 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dana JKN yang dikelola oleh BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bulan Januari-Desember 2019 sebesar Rp. 15.877.225.755,-

Pada Tahun 2018 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dana JKN yang dikelola oleh BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bulan Januari-Desember 2018 sebesar Rp. 12.239.608.961,-

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
8.3.1	Pendapatan Hibah	806.881.578,80	785.990.910,95

Terdapat Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Antropometri Kit sebanyak 22 set sebesar Rp. 90.548.268,80,- sesuai dengan BAST Nomor KN.01.01/2/PPK-Antrop/00487/2019 Tanggal 05 November 2019 dan Hibah berupa Pemberian Tambahan Makanan (PMT) BAST Terlampir.

Terdapat Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa alat kantor rumah tangga berupa PC Unit dan Notebook , alat studio komunikasi berupa HP sebesar Rp. 23.714.455,- sesuai dengan BAST Nomor KN.02.07/X/618/2018 Tanggal 21 Februari 2018 dan alat kedokteran sebesar Rp. 64.003.940,- sesuai dengan BAST Nomor KN.02.04/6/PPK/1091/VI/2018 Tanggal 8 Agustus 2018. Serta Hibah berupa Pemberian Tambahan Makanan (PMT).

• **BEBAN OPERASI**

Jumlah berikut merupakan beban pegawai dalam tahun anggaran 2019. Jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.1</b>	<b>Beban Pegawai LO</b>	<b>56.394.457.354</b>	<b>48.194.649.385</b>
<b>9.1.1.01</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan - LO</b>	<b>46.297.040.512</b>	<b>40.823.006.725</b>
	Gaji Pokok PNS	30.288.027.020	26.991.726.400
	Tunjangan Keluarga	2.823.156.521	2.593.859.275
	Tunjangan Jabatan	184.840.000	275.080.000
	Tunjangan Fungsional	2.459.853.000	2.099.329.000
	Tunjangan Fungsional Umum	616.236.000	542.160.000
	Tunjangan Beras	1.952.443.200	1.900.952.580
	Tunjangan PPh	23.461.663	2.544.177
	Iuran JKK dan JKM	290.644.934	0
	Gaji Ketiga Belas	3.831.008.178	3.218.782.910
	Tunjangan Hari Raya	3.827.369.996	3.198.572.383
<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>9.1.1.02</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO</b>	<b>9.866.940.842</b>	<b>7.157.229.160</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.943.439.260	5.714.883.063
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.923.501.582	1.442.346.097

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
9.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO</b>	0	25.312.500
	Beban Insentif Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	0	25.312.500

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
9.1.1.07	<b>Uang Lembur - LO</b>	230.476.000	189.101.000
	Uang Lembur PNS-LO	160.772.000	132.569.000
	Beban Uang Lembur Pengelola BLUD	69.704.000	56.532.000

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
9.1.2	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>43.282.418.060,38</b>	<b>33.057.115.606,17</b>

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2019. Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
9.1.2	Beban Persediaan	6.193.235.062,38	3.818.862.717,17,-

Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
Sisa Persediaan di Neraca Awal TA 2018	4.807.063.415,53	4.220.276.048,75
Beban Persediaan TA 2018	6.082.661.131,00	3.707.377.568,00
PMT	716.333.310,00	698.272.515,95
Alat Kedokteran	15.085.260,00	0,00
Sisa Persediaan di Neraca Akhir TA 2018	<u>5.427.908.054,15</u>	<u>4.807.063.415,53</u>
<b>Beban Persediaan</b>	<b>6.193.235.062,38</b>	<b>3.818.862.717,17</b>

<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>9.1.2.01</b>	<b>Beban Bahan Habis Pakai</b>	<b>2.031.311.959,59</b>	<b>1.816.994.556,41</b>
	Beban ATK-LO	948.946.758,25	283.664.802,75
	Beban Alat Listrik dan Elektronik- LO	43.175.404,00	22.534.200,00
	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - LO	59.587.836,00	32.411.000,00
	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih-LO	91.043.159,34	82.872.622,66
	Beban BBM-LO	201.089.000,00	355.163.200,00
	Beban Pengisian Tabung Gas - LO	42.231.000,00	38.030.000,00
	Beban Peralatan Perlengkapan Kantor Pakai Habis – LO	46.593.950,00	555.831.238,00
	Beban Peralatan Dokter Pakai Habis - LO	134.600.605,00	145.781.605,00
	Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis - LO	92.905.500,00	0,00
	Beban Logistik Kantor - LO	25.967.444,00	18.625.300,00
	Beban Penghargaan-LO	53.500.000,00	65.775.000,00
	Beban Bahan Dokumentasi - LO	0,00	6.358.000,00
	Beban Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-umbul – LO	213.059.335,00	198.219.189,00
	Belanja Peralatan Kantor Lainnya - LO	1.541.000,00	11.728.399,00
	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - LO	2.450.000,00	0,00
	Beban Peralatan Kelengkapan Pasien - LO	74.320.350,00	0,00

<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>9.1.2.02</b>	<b>Beban Persediaan Bahan/ Material-LO</b>	<b>4.161.923.102,79</b>	<b>2.001.868.160,76</b>
	Beban Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	3.000.000,00
	Beban Bahan Obat-obatan-LO	2.777.300.195,04	1.643.403.860,76

Beban Bahan Dokumentasi	6.932.750,00	0,00
Beban Bahan Makanan Pokok	534.640.676,00	355.464.300,00
Beban PMT	838.549.481,75	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Jasa</b>	<b>29.660.408.369,00</b>	<b>23.151.551.583,00</b>

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.03</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>9.263.029.983,00</b>	<b>9.475.945.815,00</b>
	Beban Jasa Telepon-LO	9.371.269,00	12.548.313,00
	Beban Jasa Air-LO	29.952.975,00	27.169.581,00
	Beban Jasa Listrik-LO	353.412.715,00	269.266.418,00
	Beban Jasa Surat Kabar-LO	3.385.000,00	4.680.000,00
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet-LO	185.724.036,00	98.890.831,00
	Beban Jasa Paket/Pengiriman-LO	0,00	154.000,00
	Beban TV Kabel	0,00	660.000,00
	Beban Jasa Laboratorium-LO	25.745.600,00	21.674.000,00
	Beban Jasa Piket Malam	0,00	109.440.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan – Jaspel BLUD	6.106.005.591,00	6.762.010.955,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan – Jampersal Kesmas	2.549.432.797,00	2.169.451.717,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>6.726.811.600,00</b>	<b>3.121.677.717,00</b>
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO	6.726.811.600,00	3.121.677.717,00



No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.05</b>	<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>600.474.844,00</b>	<b>299.285.930,00</b>
	Beban Jasa service	74.731.062,00	111.111.183,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	222.215.086,00	126.200.201,00
	Beban Bahan Bakar Minyak	268.443.096,00	29.290.546,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	35.085.600,00	32.684.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.06</b>	<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.296.474.999,00</b>	<b>905.934.605,00</b>
	Beban Jasa service	1.016.021.678,00	637.788.755,-
	Beban Penggantian Suku Cadang	280.453.321,00	266.245.850,-
	Beban Bahan Bakar Minyak	0,00	1.900.000,-

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.07</b>	<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>76.650.000,00</b>
	Beban Jasa service	54.600.000,00	65.400.000,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	11.250.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.10</b>	<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>92.782.000,00</b>	<b>69.222.160,00</b>
	Beban Belanja Sewa Meja Kursi-LO	3.460.000,00	3.400.000,00
	Beban Belanja Sewa Tenda-LO	14.500.000,00	6.550.000,00
	Beban Belanja Sewa Sound Sistem	0,00	2.000.000,00
	Beban Belanja Sewa Transportasi Sampah Medis	74.822.000,00	57.272.160,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>923.794.150,00</b>	<b>862.918.300,00</b>
	Beban Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO	26.647.500,00	9.650.000,00
	Beban Belanja makanan dan minuman rapat-LO	367.680.400,00	241.485.700,00
	Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	2.097.500,00	4.889.100,00
	Beban Belanja makanan dan minuman peserta-LO	470.478.750,00	569.803.500,00
	Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO	56.890.000,00	37.090.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.12</b>	<b>Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>132.245.600,00</b>
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.000.000,00	132.245.600,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.13</b>	<b>Beban Pakaian Kerja</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>19.773.000,00</b>
	Beban Pakaian Kerja Lapangan	9.240.000,00	19.773.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.24</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.944.106.514,00</b>	<b>1.756.675.000,-</b>
	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh-LO	19.700.000,00	13.800.000,-
	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO	60.300.000,00	38.250.000,-
	Beban Honor Juri/Penilai/Pembina	0,00	243.000.000,-
	Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	518.534.000,00	449.305.000,-

	Beban Jasa Pegawai Harian Lepas-LO	1.166.022.514,00	787.300.000,-
	Beban Jasa Pengamanan Kantor-LO	168.840.000,00	175.020.000,-
	Beban Jasa Informasi/Promosi-LO	1.140.000,00	50.000.000,-
	Beban Jasa Konsultan	9.570.000,00	0,-
<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>9.1.2.25</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.698.594.279,00</b>	<b>6.431.223.456,00</b>
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	28.675.000,00	11.700.000,00
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Brg dan jasa-LO	38.700.000,00	30.425.000,00
	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur-LO	138.600.000,00	727.750.000,00
	Honorarium Penguana Anggaran dan KPA-LO	165.600.000,00	129.900.000,00
	Honorarium PPK-SKPD dan Pembantu PPK-LO	17.400.000,00	17.400.000,00
	Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK-LO	269.075.000,00	199.680.000,00
	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara-LO	172.230.000,00	191.250.000,00
	Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga	1.500.000,00	0,00
	Beban Kursus-kursus singkat-LO	1.085.113.486,00	445.383.775,00
	Beban Belanja Sosialisasi-LO	6.496.653.793,00	3.764.756.650,00
	Beban Belanja Bimbingan Teknis-LO	73.897.000,00	455.696.131,00
	Beban Belanja Jasa Pengelola BLUD	194.400.000,00	194.400.000,00
	Beban Jasa Tim Rekrutment Non PNS	16.750.000,00	9.900.000,00
	Beban Utang Persalinan		413.294.400,00
	Beban Utang Pengadaan		(160.312.500,00)

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>9.1.2.18</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>460.338.712,00</b>	<b>173.651.800,00</b>
	Beban Belanja Pemeliharaan Gedung/ruang/dinding	363.028.232,00	119.936.800,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Pagar	14.984.300,00	0,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	36.876.800,00	26.001.500,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan	16.388.000,00	9.667.000,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	26.661.380,00	16.046.500,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Fogging	2.400.000,00	2.000.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>6.968.435.917,00</b>	<b>5.913.049.506,00</b>
	Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -LO	5.742.604.500,00	4.838.160.000,00
	Beban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -LO	1.225.831.417,00	1.074.889.506,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>479.683.031,00</b>	<b>286.974.298,00</b>
	BM Tidak dikapital / PM	9.066.125,00	26.733.647,00
	Mutasi Ekstrakom	453.641.306,00	215.320.433,00
	BM Tidak Dikapital	16.975.600,00	0,00
	Hibah dari Kemenkes Tdk dikapital	0,00	44.920.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>8.036.069.996,08</b>	<b>6.494.669.975,45</b>

Beban Penyusutan Tahun 2019 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada tahun berjalan yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp. 6.706.392.822,11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.313.150.114,22 dan JIJ sebesar Rp. 16.527.059,75

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>(1.092.850)</b>	<b>(1.194.070)</b>

Pada tahun 2019 terdapat beban penyisihan piutang sebesar Rp. (1.092.850,-). Beban Penyisihan piutang tersebut merupakan beban penyisihan dari piutang retribusi Klaim Non Persalinan Tahun 2019 sebesar Rp. 43.130.000,-

#### 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>82.489.519.366,13</b>	<b>78.409.491.837,80</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 82.489.519.366,13 yang terdiri dari ;

1.	Jumlah Asset Lancar	8.740.389.358,15	7.800.492.041,53
2.	Jumlah Asset Tetap	71.018.319.725,14	72.110.817.398,42
3.	Jumlah Asset Lainnya	2.996.963.482,18	2.996.963.482,18
4.	Jumlah Kewajiban	827.559.309,00	418.753.556,00
5.	Jumlah Ekuitas	82.775.672.565,47	82.489.519.366,13

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(91.759.418.007,66)</b>	<b>(73.540.211.322,67)</b>

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (91.759.418.007,66).

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (73.540.211.322,67)

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>R/K PPKD</b>	<b>91.381.574.656,00</b>	<b>78.146.561.851,00</b>

R/K PPKD merupakan selisih antara R/K (M) sebesar Rp. (1.447.218.000,-) dan R/K (K) PPKD sebesar Rp. 93.509.847,57,-

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar</b>	<b>(183.562.758,-)</b>	<b>(526.323.000,-)</b>

Terdiri dari :

-	Mutasi Tambah Aset Tetap	48.408.042	219.116.000,00
-	Mutasi Kurang Aset Tetap	(231.970.800)	(745.439.000,00)

No.	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>81.928.113.256,47</b>	<b>82.489.519.366,13</b>

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 81.928.113.256,47 yang terdiri atas :

1.	Jumlah Asset Lancar	8.740.389.358,15	7.800.492.041,53
2.	Jumlah Asset Tetap	71.018.319.725,14	72.110.817.398,42
3.	Jumlah Asset Lainnya	2.996.963.482,18	2.996.963.482,18
4.	Jumlah Kewajiban	827.559.309,00	418.753.556,00
5.	Jumlah Ekuitas	82.755.672.565,47	82.908.272.922,13

**BAB. VI.**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN**

**A. Kedudukan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan lingkungan sehat.

Dalam rangka anggaran pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang Kesehatan.

Pengelolaan Bidang Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 ). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.

**B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan juga diatur dengan Peraturan Bupati Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

**Kepala Dinas**

**Sekretaris**

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Perencanaan

**Bidang Pelayanan Kesehatan dengan seksi :**

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi

**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan seksi :**

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Seksi Surveillance Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza

**Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan seksi :**

- Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Obat Publik
- Seksi Alat Kesehatan dan Fasyankes
- Seksi SDM Kesehatan dan Diklat

**Bidang Kesehatan dan Masyarakat dengan seksi :**

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan
- Seksi Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga



**BAB. VII**  
**P E N U T U P**

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2019.

Untuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun realisasi atas Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 15.834.095.755,- atau 86,77 % dgn perincian sbb :

Jenis Pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Lain-lainn PAD Yang Syah</b>	<b>18.248.513.815</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>86,77</b>
<b>Jumlah</b>	<b>18.248.513.815</b>	<b>15.834.095.755</b>	<b>86,77</b>

- Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 106.704.453.833,- atau 81,96 % dengan perincian sbb :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
- Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan PNS )	<b>58.495.526.894</b>	<b>56.163.981.354</b>	<b>96,01</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>71.698.807.307</b>	<b>50.540.472.479</b>	<b>70,49</b>
- Belanja Pegawai	1.470.541.000	1.195.106.000	81,27
- Belanja Barang dan Jasa	53.512.784.155	41.915.202.182	78,33
- Belanja Modal	16.715.482.152	7.430.164.927	44,45
<b>Jumlah</b>	<b>130.194.334.201</b>	<b>106.704.453.833</b>	<b>81,96</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan ada beberapa belanja yang tidak tercapai sesuai dengan target indicator kinerja hal ini disebabkan antara lain :

- Kurangnya personil / staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga mengganggu percepatan proses pelelangan Barang dan Jasa.
- Beberapa pengalihan belanja yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tidak disahkan.